PERPUSTAKAAN UNIKOM BANDUNG

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Peranan Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara.

Kegiatan Administrasi Pengurusan Piutang Negara, jika didukung oleh data yang akurat dan dihimpun secara komputerisasi melalui SAIPPN akan berperan dalam proses Pengurusan Piutang Negara. Dengan kata lain peranan dari SAIPPN adalah :

1. Menghimpun data dalam proses Pengurusan Piutang Negara, dimulai dari diterimanya penyerahan Piutang Negara oleh Kreditur sampai pada tahap akhir (piutang lunas/lelang).
2. Sebagai fasilitas pengaman data, dalam hal ini penting karena data Pengurusan Piutang Negara harus tetap tersimpan dalam waktu yang lama.
3. Merupakan seperangkat alat untuk memproses setiap perkembangan dalam Pengurusan Piutang Negara.
4. Menyajikan laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan tahunan yang merupakan laporan Pengurusan Piutang Negara.
5. Memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok seksi Informasi dan Hukum dalam membantu Pengurusan Piutang Negara, Seksi Informasi dan Hukum mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam menunjang kelancaran Pengurusan Piutang Negara.

4.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara.

Hambatan yang ada dalam Aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara, pada dasarnya terdapat pada terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang Teknis dan Program Dasar yang digunakan dalam SAIPPN sehingga jika terjadi kerusakan teknis Perangkat Keras (Hardware) ataupun Perangkat Lunak (Software), terpaksa hanya dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak cepat karena proses pengajuan perbaikan dilaksanakan melalui surat menyurat. Karena keterlambatan tersebut, Proses Pengurusan Piutang pun terganggu.

Masalah yang sangat mendesak saat ini dalam menangani atau mengurus piutang negara antara lain adalah :

1. Masalah Penanganan Pengurusan Piutang Negara di KP3N.

   Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ditangani BUPLN/PUPN sampai tahun 1994 sekitar 127.000 berkas dan menurut perkiraan yang baru dapat ditangani adalah sekitar 25 persen, hal ini disebabkan antara lain :

   a. Jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) sebagai unit operasional BUPLN kurang memadai.
   b. Proses pengurusan piutang negara adalah rumit, karena setiap berkas proses pengurusannya melalui prosedur hukum lebih kurang sebanyal 32 jenis surat.
   c. Pelaksanaan prosedur tersebut dilakukan secara manual yang prosesnya memerlukan waktu relatif cukup lama.

d. Perkembangan proses pengurusan setiap berkas mengalami kesulitan untuk dipantau sehingga pegurusan menjadi kurang efektif.

2. Masalah Kebutuhan Informasi

Sebagaimana diketahui bahwa sistem Informasi di lingkungan BUPLN saat ini belum sistematis dan masih manual. Dampak dari sistem tersebut terhadap proses pengurusan piutang negara adalah :

a. Kebutuhan informasi belum dapat disajikan dengan baik, cepat dan akurat untuk setiap unit kantor operasional BUPLN.
b. Belum adanya informasi yang dapat dijadikan alat untuk memonitor sampai seberapa jauh proses pengurusan dan permasalahan pengurusan piutang negara yang dihadapi serta hasil yang dicapai dari hasil penagihan piutang negara.
c. Informasi yang dihasilkan belum dapat dijadikan bahan untuk kebutuhan pengambilan keputusan, analisa, evaluasi, perencanaan dan fungsi manajemen lainnya.

4.3. Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan.

Hambatan yang ada dalam Aplikasi SAIPPN telah diuraikan sebelumnya, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Mengikutsertakan Staf dalam Pendidikan dan Latihan Perangkat Keras (Hardware) Engnering untuk mengatasi masalah teknis.
2. Menugaskan Staf mengikuti pendidikan programer untuk mengatasi masalah Perangkat Lunak (Software).

3. Merekrut seorang ahli komputer (Sarjana Informatika) untuk ditunjuk sebagai tenaga Supervisor guna mengawasi kelangsungan proses Aplikasi SAIPPN.
4. Perbaikan Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software) secara berkesinambungan dan penambahan fasilitas/perangkat keras dan program.
5. Diperlukan rasa tanggung jawab dari semua User/pemakai SAIPPN untuk terlibat langsung dalam Aplikasi SAIPPN dan menjaga kelangsungannya.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

   Agar dalam Pengurusan Piutang Negara berjalan dengan benar dan mengingat jumlah penyerahan piutang lebih banyak daripada karyawan, maka pihak Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara perlu meningkatkan kunatitas dan kualitas sumber daya manusia dan memberikan penyuluhan kepada para karyawan.